

Pendapatan Retribusi Daerah- 600 Lebih Ketua RT/RW Terancam Dicotot, Berapa Insentif Diterima Tiap Bulan?



Wali Kota Makassar Danny Pomanto bakal memecat sekitar 600-700 Pj Ketua RT/RW dalam waktu dekat.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/22/600-lebih-ketua-rtrw-terancam-dicotot-berapa-insentif-diterima-tiap-bulan>

Wali Kota Makassar Danny Pomanto bakal memecat sekitar 600-700 Pj Ketua RT/RW dalam waktu dekat.

Bukan tanpa sebab, ratusan Pj Ketua RT/RW tersebut dianggap tak mampu lagi melayani masyarakat.

Di samping itu, beberapa dari mereka dianggap malas bahkan sampai tilep iuran sampah.

Lantas berapa sebenarnya insentif Pj Ketua RT/RW di Makassar?

Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menjelaskan, kenaikan insentif Pj RT/RW akan dihitung mulai Februari 2024.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya.

Kolase Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Penampakan Kota Makassar. Danny Pomanto akan mengevaluasi penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Kota Makassar (kolase Tribun Timur)

“Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru,” ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota Makassar lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, [Wali Kota Makassar Danny Pomanto](#) akan mengevaluasi Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di [Makassar](#), [Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber [Danny Pomanto](#) di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

- [Wali Kota Makassar Danny Pomanto](#) bakal memecat sekitar 600-700 Pj Ketua RT/RW dalam waktu dekat.

Bukan tanpa sebab, ratusan Pj Ketua RT/RW tersebut dianggap tak mampu lagi melayani masyarakat.

Di samping itu, beberapa dari mereka dianggap malas bahkan sampai tilep iuran sampah.

Lantas berapa sebenarnya insentif Pj Ketua RT/RW di [Makassar](#)?

Pj Sekretaris Daerah Kota [Makassar](#), Firman Hamid Pagarra menjelaskan, kenaikan insentif Pj RT/RW akan dihitung mulai Februari 2024.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya.

Kolase Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Penampakan Kota Makassar. Danny Pomanto akan mengevaluasi penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Kota Makassar (kolase Tribun Timur)

"Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru," ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota Makassar lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, [Wali Kota Makassar Danny Pomanto](#) akan mengevaluasi Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di [Makassar](#), [Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber [Danny Pomanto](#) di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

- [Wali Kota Makassar Danny Pomanto](#) bakal memecat sekitar 600-700 Pj Ketua RT/RW dalam waktu dekat.

Bukan tanpa sebab, ratusan Pj Ketua RT/RW tersebut dianggap tak mampu lagi melayani masyarakat.

Di samping itu, beberapa dari mereka dianggap malas bahkan sampai tilep iuran sampah.

Lantas berapa sebenarnya insentif Pj Ketua RT/RW di [Makassar](#)?

Pj Sekretaris Daerah Kota [Makassar](#), Firman Hamid Pagarra menjelaskan, kenaikan insentif Pj RT/RW akan dihitung mulai Februari 2024.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya.

Kolase Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Penampakan Kota Makassar. Danny Pomanto akan mengevaluasi penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Kota Makassar (kolase Tribun Timur)

"Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru," ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota Makassar lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, [Wali Kota Makassar Danny Pomanto](#) akan mengevaluasi Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di [Makassar, Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber [Danny Pomanto](#) di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/22/600-lebih-ketua-rtrw-terancam-dicopot-berapa-insentif-diterima-tiap-bulan>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.